

KATA PENGANTAR

Dokumen RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur merupakan uraian pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Gubernur Terpilih Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 untuk urusan Kesatuan Bangsa selama 2 (dua) tahun kedepan, sehingga keberhasilan pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran tersebut secara langsung menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu Penyusunan Review Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur periode 2017 – 2018, saya ucapkan terimakasih.

Samarinda, 30 September 2017

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

YUDHA PRANOTO

NIP. 19640817 201006 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2. Sumber Daya OPD	9
2.3. Kinerja Pelayanan OPD	10
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan OPD.....	16
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	24
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan OPD	24
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
3.3. Telaahan Renstra K/L	27
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	29
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis	33
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	35
4.1. Visi dan Misi OPD	35
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	37
4.3. Strategi dan Kebijakan OPD	42

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	47
BAB VI	INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	63
BAB VII	KAIDAH PELAKSANAAN	65

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Struktur Organisasi dan Tata Kerja OPD	8
--	---

DAFTAR TABEL

Halaman

1.	Rekapitulasi PNS dan CPNS OPD	9
2.	Rekapitulasi PNS dan CPNS berdasarkan eselon dan gender ..	10
3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD	13
4.	Anggaran dan Realisasi Anggaran 2009 – 2013	15
5.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25
6.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	41
7.	Rencana Program, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif.	50
8.	Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), dengan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Perumusan rancangan Renstra OPD merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD dalam rangka penyusunan rancangan RPJMD. Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun Review Rencana Strategis Tahun 2017 - 2018 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Kalimantan Timur.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700):
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah .
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi.

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 - 2025 ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 - 2013;
19. Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur..

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk menjabarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018 kedalam rencana aksi yang lebih konkrit, menjalankan tugas fungsi dan mencapai sasaran pembangunan OPD yang diamanatkan dalam konstitusi.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Untuk memetakan permasalahan dan prioritas program dan kegiatan selama 2 (dua) tahun ke depan serta sasaran jangka menengah yang bersifat strategis.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
3. Sebagai alat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Review Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2017-2018 ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian sesuai dengan Permendagri No 54 tahun 2010, yaitu:

BAB I Pendahuluan, mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan OPD, mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat daerah (OPD), Sumber Daya OPD, Kinerja Pelayanan OPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan, mencakup: Visi dan Misi OPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD, Strategi dan Kebijakan OPD.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab VI Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII Kaidah Pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Gambaran pelayanan Organisasi perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penting dalam perencanaan layanan OPD untuk memahami kondisi riil paling mutakhir dari organisasi yang akan menyusun Review rencana strategis sehingga perencanaan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi faktual, khususnya menyangkut sumber daya internal organisasi dan kinerja layanan yang telah dicapai.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur OPD

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 83 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

TUGAS POKOK

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

FUNGSI

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

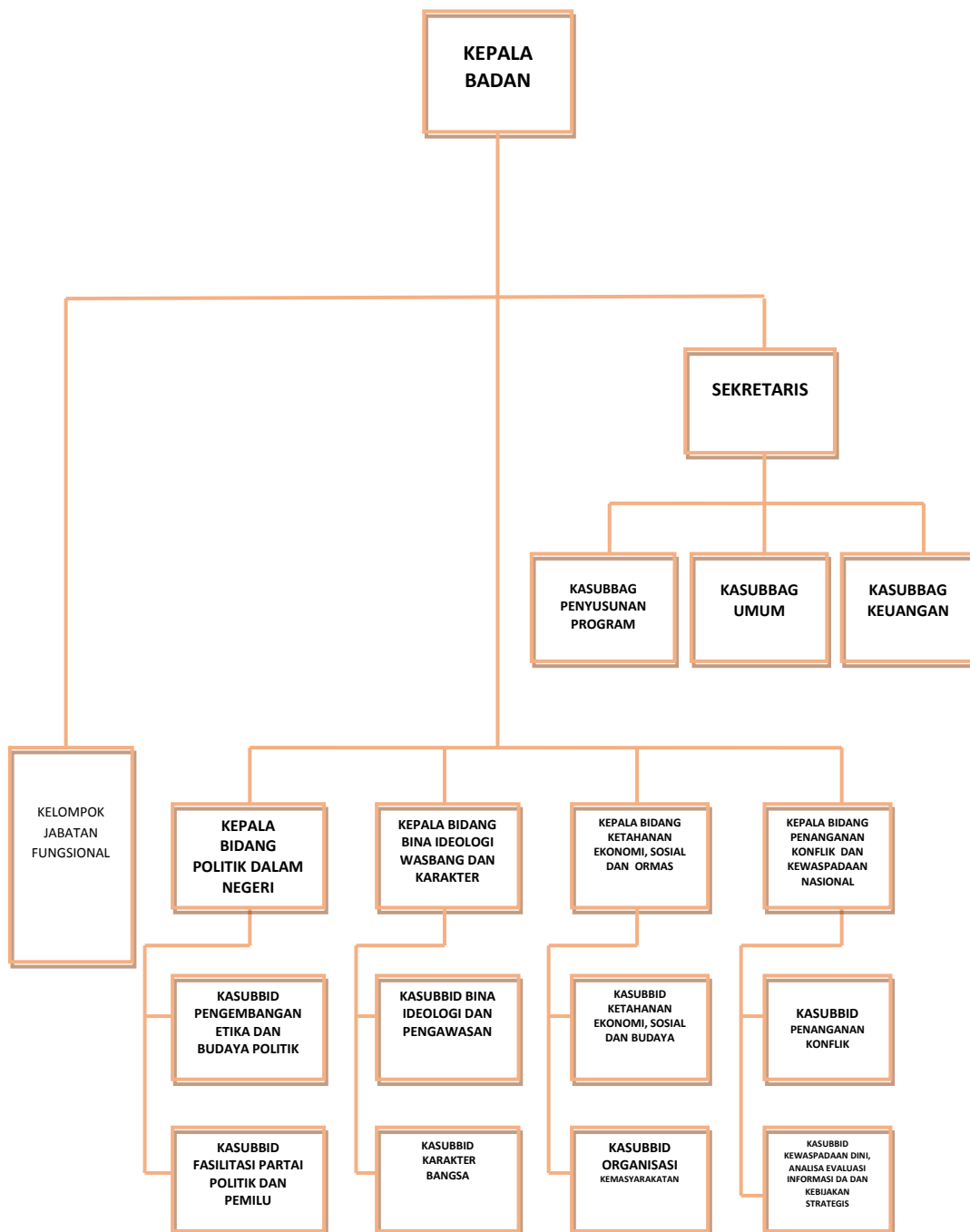
- a. Perumusan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Perumusan perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis dibidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter ;
- e. Perumusan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis di bidang Politik Dalam Negeri;
- f. Perumusan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis di bidang pembinaan Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan Organisasi Kemasyarakatan (ormas) ;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian teknis di bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- i. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Secara rinci struktur organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Gambar 1 berikut :

Gambar . 1

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



2.2 Sumber Daya OPD.

Jumlah pegawai Badan Kesaatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 50 orang, sebagaimana terlihat dibawah ini :

Rekap PNS dan CPNS Berdasarkan Golongan dan Gender			
Keadaan : 01 April 2017			
GOLONGAN	GENDER		JUMLAH
	PRIA (P)	WANITA (W)	
1	2	3	4
IV	7	3	10
III	15	10	25
II	13	2	15
I	--	--	--
JUMLAH	35	15	50

Rekap PNS dan CPNS Berdasarkan Eselon dan Gender			
Keadaan : 01 April 2017			
ESELON	GENDER		JUMLAH
	PRIA (P)	WANITA (W)	
1	2	3	4
I	--	--	--
II	1	--	1
III	3	2	5
IV	7	4	11
V	--	--	--
ESELON	11	6	17
NON ESELON	24	9	33
JUMLAH	35	15	50

Sedangkan tenaga kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 8 (delapan) orang.

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

A. Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berkenaan, sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun ke - (= Capaian / target x 100 %)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Revmen (Revolusi Mental)	-	100%	-					100 orang					100 orang			-	-	100,00%
2.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan kesadaran nilai luhur budaya bangsa.	-	100%	-	100 orang	-	-			100 orang	-	-			100,00%	-	-		
3.	Kegiatan sosialisasi PPWK	-	100%	-					2500 orang					2500 orang					100,00%
4.	Jumlah peserta yang mengikuti pemantapan wasbang bagi guru dan dosen/ustadz				100 orang	-	-	-	-	100 orang	-	-	-	-	100,00%	-	-	-	-
5.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan kesadaran bela negara.	-	100%	-	100 orang	100 orang	100 orang	500 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	500 orang	100 orang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi revitalisasi nilai-nilai Pancasila.	-	100%	-	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.	Jumlah peserta yang mengikuti pembauran bagi generasi muda, pelajar dan pramuka.				100 orang	100 orang	100 orang		-	100 orang	100 orang	100%		-	100,00%	100,00%	100,00%		-
8.	Jumlah peserta yang mengikuti wasbang dan cinta tanah air di daerah perbatasan				100 orang					100 orang					-	100,00%			
9.	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan peran serta aparatur pemda, ormas bidang kebudayaan dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya.				-	100 orang	-	-	-	-	100 orang	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
10.	Data-data yang berkaitan dengan deteksi dini.	-	100%	-	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

11	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketertiban, keamanan tentang rawan bencana dan rawan konflik				200 orang	200 orang	200 orang		-	134 orang	184 orang			-	67,00%	92,00%	-	-	-	
12	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/desiminasi/publikasi peraturan perundang-undangan penanganan konflik dan peraturan pelaksanaan lainnya.	-	100%	-	200 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	200 orang	100 orang	100 orang	-	-	100%	100%	100%	100%	100,00%	
13	Jumlah surat Ijin Peneitian yang diterbitkan							16 buah	101 buah				16 buah	45 buah					100,00%	48,00%
14	Jumlah konflik yang ada.				169 konflik	144 konflik	122konflik	104 konflik	88 konflik	111 Konflik	75 konflik	58 konflik	60 konflik	65konflik	65,68%	52,09%	47,54%	57,70%	68,19%	
15	Data tentang kebijakan penanganan konflik.	-	100%	-					4 dokumen				4 dokumen						100,00%	
16	Jumlah peserta dari parpol yang mengikuti kegiatan.	-	100%	-					100 orang				100 orang						100,00%	
17	Data tentang Parpol, Orpol, Ormas, LSM dan lembaga adat.	-	100%	-				4 dokumen	4 dokumen			4 dokumen	4 dokumen						100,00%	100,00%
18	Jumlah masyarakat yang memahami Pemilu.	-	100%	-				400 orang	400 orang				400 orang	400 orang					100,00%	100,00%
19	Data tentang berkas bantuan parpol.	-	100%	-				4 dokumen	4 dokumen				4 dokumen	4 dokumen					100,00%	100,00%
20	Jumlah masyarakat yang memahami IDI	-	100%	-	100 orang	100orang	65 orang	80 orang	80 orang	100 orang	100 orang	100 orang	65 orang	80 orang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
21	Data tentang Ormas, LSM, OKP dan organisasi lainnya yang mengajukan bantuan keuangan.	-	100%	-				80 orang	80 ormas/lsm dan OKP				80 orang	80 orang					100,00%	100,00%
22	Data tentang dampak kelangkaan/kenaikan harga	-	100%	-	-	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
23	Data tentang dampak kebijakan perekonomian.	-	100%	-	-	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
24	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peredaran uang palsu.	-	100%	-	100 orang	100 orang	100 orang			100 orang	100 orang	100 orang			-	100,00%	100,00%	100,00%		
25	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi cinta produksi dalam negeri dan perlindungan konsumen.	-	100%	-	100 orang	-	-			100 orang	-	-			100,00%	-	-			
26	Jumlah pelajar yang mengikuti sosialisasi pemberantasan balapan liar.	-	100%	-	100 orang	100 orang	-	-		100 orang	100 orang	-	-		100,00%	100,00%	-	-		
27	Jumlah peserta yang mengikuti Rakor FKUB		100%		100 orang	100 orang	100 orang			100 orang	100 orang	100 orang				100,00%	100,00%	100,00%		
28	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan toleransi kerukunan umat beragama		100%		100 orang	100 orang	100 orang			100 orang	100 orang	100 orang				100,00%	100,00%	100,00%		

B. Analisis Pengelolaan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD pada level program, selanjutnya kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan dianalisis pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2.
 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -				
	2009	2010	2011	2012	2013	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BL	12,902,269,000	9,295,400,000	10,943,521,760	10,690,400,000	19,078,500,000	0.00	74.73	68.15	92.20	67.41
Realisasi	-	6,946,579,003	7,457,700,687	9,856,898,565	12,859,939,397					
BTL	5,656,306,195	5,308,928,000	5,678,323,000	6,407,943,000	5,384,198,000	0.00	92.35	87.06	80.48	67.78
Realisasi	-	4,902,614,685	4,943,426,861	5,156,905,288	3,649,160,592					
Total	18,558,575,195	14,604,328,000	16,621,844,760	17,098,343,000	24,462,698,000	0.00	81.13	74.61	87.81	67.49
Realisasi	-	11,849,193,688	12,401,127,548	15,013,803,853	16,509,099,989					

Sumber Data 2013 : Realisasi bulan Agustus 2013

Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2009 - 2013 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Dari total anggaran dan realisasinya dapat diketahui bahwa rasio antara Realisasi dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2009 - 2012 sebagai berikut : tahun 2009 sebesarpersen, tahun 2010 sebesar 81,13 persen, tahun 2011 sebesar 74,61 persen, tahun 2012 sebesar 87,81 persen, tahun 2013 sebesar 82,41 persen.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

A. Tantangan

Tantangan dalam Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur meliputi: Potensi Kerawanan Sosial Provinsi Kalimantan Timur Politisasi Nilai-Nilai Agama, dan Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum.

1) Potensi Kerawanan Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

Karakteristik Kalimantan Timur yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen, mempunyai potensi kerawanan sosial, politik dan kewilayahan yang dapat mengarah pada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horisontal. Kondisi kemajemukan masyarakat Kalimantan Timur yang rawan konflik, implementasi otonomi daerah yang belum konsisten, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang masih signifikan, makin rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum, serta pelanggaran HAM mendorong munculnya tirani sosial/massa yang mengarah pada anarkhisme. Disamping itu, merosotnya etika dan moral bangsa yang ditandai dengan menguatnya fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme(KKN) merupakan hambatan signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

2) Politisasi Nilai-Nilai Agama

Masih berakarnya politisasi nilai-nilai agama sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan masih terjadi pada masyarakat di Kalimantan Timur selama beberapa tahun terakhir. Iklim kebebasan telah membuat kelompok primordial menegaskan keberadaan di dalam masyarakat, bahkan dengan tidak ragu-ragu menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Amat sering terjadi kekerasan dilakukan terhadap kelompok lain yang tidak sepaham, dengan menggunakan agama sebagai perisai. Namun yang perlu diperhatikan, berbicara soal keamanan dan ketertiban, tidak terlepas dari personalitas dari masyarakat yang kompleks. Bersatunya masyarakat didasari karena adanya kesamaan dalam hak dan kewajiban sebagai warganegara yang di lindungi sepenuhnya oleh negara. Selain nilai-nilai agama, pluralisme lainnya seperti budaya, adat istiadat, bahasa, ekonomi dan pendidikan mempunyai peran juga sebagai pemersatu atau sebagai ancaman.

3) Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum pada saat proses politik yang demokratis dan praktek hukum yang berkeadilan justru sangat diperlukan pada saat seperti sekarang ini, namun secara bersamaan terjadi pula penipisan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga politik dan hukum.

Perasaan diperlakukan tidak adil dan sikap-sikap sinis dan pesimisme yang meluas, memunculkan berbagai ungkapan kejangkelan dan ejekan terhadap dunia peradilan, antara lain berupa tuduhan "mafia peradilan" kepada dunia kehakiman, kejaksaan dan kepolisian sebagai tritunggal penegak hukum Indonesia. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pada masa lalu kurang diakui peranannya, dewasa ini mulai menunjukkan peran yang baik dalam memberdayakan sektor masyarakat menuju ke arah terbentuknya masyarakat modern (*civil society*) yang tangguh. Dalam hubungannya dengan masyarakat, pemerintah saat ini sedang mensosialisasikan perannya sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah (negara) sedang berada dalam proses transformasi dalam membentuk perannya sebagai "penengah" yang adil dalam mengupayakan penyelesaian berbagai konflik kepentingan dalam masyarakat yang majemuk ini.

- 4) Perkembangan Dinamika Politik Masyarakat seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Terkait dengan dinamika politik, saat ini masyarakat dapat menyikapi setiap perkembangan yang ada secara cerdas dan bijaksana, proaktif dan bertindak positif. Akan tetapi

terdapat sebagian golongan dalam penyampaian aspirasi politiknya kadang di luar koridor hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan dan berpotensi memperkeruh situasi dan kondisi yang ada.

5) Perubahan Paradigma Pelayanan Publik.

Seiring dengan perubahan dan tuntutan dinamika masyarakat, khususnya paradigma aparatur birokrasi memperlakukan publik pengguna layanan publik sebagai warga negara (citizen) bukan sebagai pelanggan (customer). Dengan adanya perubahan perundang-undangan, terjadi pergeseran fungsi utama Pemerintah Daerah yang semula Sebagai “Promotor Pembangunan” berubah menjadi “Pelayan Masyarakat”. Perubahan diatas sejalan paradigma good governance yang memberikan tekanan pada manajemen pemerintahan, termasuk manajemen pelayanan publik. Pemerintah tidak lagi berposisi sebagai penguasa dengan sifat hubungan hierarkis dengan masyarakat, melainkan sebagai mitra yang berkedudukan heterarkhis dengan komponen lainnya (sektor swasta dan masyarakat).

6) Sinkronisasi Kebijakan Pusat di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan harmonisasi masyarakat, Pemerintah berupaya meningkatkan berbagai perangkat perundang-undangan/ Peraturan yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat. Peraturan-peraturan

tersebut baik terkait dengan program dan kegiatan maupun forum-forum masyarakat maupun instansi terkait yang membawa konsekuensi ke daerah untuk memfasilitasi kebijakan tersebut. Peraturan-peraturan tersebut antara lain pembentukan tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (Pokja IDI), Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT).

7) Program Pro-Masyarakat

Sejalan dengan tuntutan masyarakat pada era reformasi dan globalisasi maka program pembangunan kesatuan bangsa dan politik harus sejalan dengan kondisi dinamika masyarakat yang sedang berkembang. Dalam menyikapi hal tersebut tentunya kegiatan pembinaan kesatuan bangsa dan politik harus mengarah kepada kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

B. Peluang

Berdasarkan tantangan utama di atas, serta sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 83 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, maka diperkirakan memiliki peluang sekaligus memungkinkan untuk melaksanakan upaya-upaya yang terkait dengan:

1) Peningkatan Persatuan dan Kesatuan

Peluang dan upaya ini ditujukan untuk menyepakati makna penting persatuan dan kesatuan bangsa dalam konstelasi politik yang sudah berubah, yang dapat dilakukan dengan kegiatan pokok membangun dan melaksanakan sistem deteksi dini atau *early warning system* untuk merespon berbagai persoalan konflik sosial politik, membangun dan memperluas mekanisme dan jaringan kerjasama seluruh *stakeholders* bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik sosial politik, melaksanakan gerakan kampanye ataupun bentuk-bentuk advokasi lainnya secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia. Selain itu, perlunya penguatan terhadap masyarakat akan pemahamannya terhadap hak dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara Indonesia dalam kesatuan bangsa dan penguatan pemahaman “Bhineka Tunggal Ika” sebagai slogan bangsa yang menjadikan kekuatan dalam kerangka kesatuan bangsa.

2) Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik

Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam kaitan ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas lembaga-lembaga penyelenggara negara, utamanya lembaga legislatif daerah, memberikan bantuan keuangan terhadap partai politik, memberdayakan dan menata lembaga-lembaga kemasyarakatan, mensosialisasikan perlunya mendukung keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsi dan peranyang digariskan oleh konstitusi, serta melembagakan mekanisme kerjasama antar institusi negara dan antara institusi negara dan masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi.

3) Pemulihan Wilayah Pasca Konflik

Stabilitas politik dan pasca konflik merupakan agenda penting bagi upaya mewujudkan proses demokratisasi, persatuan dan kesatuan bangsa, iklim usaha yang kondusif serta terjaganya ketertiban umum di daerah. Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi terutama terkait dengan *excess* dan *dispute* yang potensial terjadi di beberapa daerah sebagai implikasinya. Hal ini

memerlukan perhatian dan upaya-upaya terstruktur dalam proses pembinaan politik yang demokratis di tingkat lokal serta peningkatan wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu tetap dipelihara.

4) Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, maka para *stakeholder* (Partai Politik, tokoh politik, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya) diharapkan untuk berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Penguatan dalam meningkatkan partisipasi politik melibatkan :

a. Partai Politik

Partai Politik berperan dalam menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat;

b. Tokoh politik dan tokoh masyarakat

Para tokoh politik dan tokoh masyarakat diharapkan bisa memberikan teladan kepada masyarakat mengenai tata cara berpolitik yang baik, santun, penuh dedikasi dan loyalitas sehingga masyarakat tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.

5) Peningkatan Budaya Multikultural dan Toleransi

Masyarakat Kalimantan Timur sangatlah beranekaragam, termasuk didalamnya sistem religi atau sistem kepercayaan yang hidup dan diyakini oleh masyarakat dalam membangun sikap multikultural, maka upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi sikap toleransi sosial tanpa membeda-bedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

6) Peningkatan Sumber Daya Manusia Bakesbangpol

dalam menunjang kinerja SDM Bakesbangpol, perlu upaya-upaya peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dengan harapan meningkatnya kinerja aparatur Bakesbangpol yang handal dan profesional.

7) Peningkatan Anggaran

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya secara proporsional jumlah alokasi anggaran yang diperlukan dalam meningkatkan peran di area pembinaan tersebut.

8) Sarana dan Prasarana

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya sarana dan

prasarana yang diperlukan dalam mendukung pembinaan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Bab II, Kajian terhadap Visi Misi Gubernur dan Kajian terhadap Renstra maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Bakesbangpol Provinsi Kalimantan Timur beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Hasil Analisa Kondisi Internal maupun Eksternal

No.	Permasalahan Berdasarkan Pelayanan	Tugas dan Fungsi SKPD Penanggung Jawab
1	2	3
1.	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam politik.	Bidang Politik Dalam Negeri
2.	Masih rendahnya wawasan kebangsaan masyarakat.	Bidang Bina Ideologi Wasbang dan Karakter Bangsa
3.	Minimnya anggaran yang diterima, sehingga fasilitasi sulit untuk dilaksanakan	Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Ormas
4.	Belum termonitornya pengawasan terhadap Ormas	
5.	Masih kurangnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Bidang Penanganan Bencana Konflik dan Kewaspadaan Nasional
6.	Masih belum optimalnya sistem dan prosedur pelayanan terhadap masyarakat	Sekretariat

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 - 2018 maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

A. Visi

Adapun Visi berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 - 2018 yaitu:

Mewujudkan Kalimantan Timur Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan.

B. Misi

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, berikut ini misi yang ditentukan sebagaimana terdapat pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 - 2018 yaitu :

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energy terbarukan.
3. Mewujudkan infra struktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat berperspektif perubahan iklim.

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 - 2018, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

akan mendukung pelaksanaan misi ke 4 yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.”** sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bakesbangpol Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Gubernur dan Wakil Gubernur

Visi : Mewujudkan Kalimantan Timur Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik	Belum tersedianya sistem informasi pelayanan yang mudah diakses melalui internet sesuai indikator kinerja yang akan dicapai dalam RPJMD 2013 - 2018	Pengumpulan data dan analisis data terkait kebutuhan pembangunan sistem informasi	Tersedianya SDM yang mampu menangani pelayanan secara online.

3.3. Telaahan Renstra Kemendagri Tahun 2010 - 2014

Visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) pada tahun 2010 - 2014 adalah : **Terwujudnya sistem politik demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta kebudayaan masyarakat yang partisipatif, dengan di dukung sumber**

daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur ada beberapa kesesuaian dan merupakan penjabaran dari visi dan misi tersebut.

Adapun misi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 - 2014 tersebut adalah :

1. Memperkuat keutuhan NKRI serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis.
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum.
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik.
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat dan daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan.
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya ; serta
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa.

Dari misi renstra Kemendagri tersebut yang sesuai dengan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah di misi ke 1 dan 6.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Visi pembangunan provinsi Kalimantan Timur mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat agroindustry dan energy terkemuka menuju masyarakat adil dan sejahtera.

Tujuan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Timur.

Terwujudnya penataan ruang yang mendukung provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat agroindustri dan energy terkemuka menuju masyarakat adil, makmur dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan. Yang didukung dengan 4 (empat) kebijakan dengan 16 (enam belas) strategi.

4 (Empat) Kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. *Pengembangan sektor ekonomi produktif migas dan tambang yang menjadi sektor unggulan.*

Provinsi Kalimantan Timur untuk lebih mendukung tujuan pembangunan nasional dan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi serta pemanfaatannya bagi segenap masyarakat wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan dukungan penataan ruang.

Dengan strategi :

- 1). Mengembangkan potensi baru kawasan eksplorasi dan mengoptimalkan kawasan eksplorasi eksisting untuk kepentingan ekonomi dan lebih mendorong pertumbuhan

ekonomi wilayah dan hasilnya bagi kesejahteraan masyarakat provinsi Kalimantan Timur.

- 2). Mengembangkan kawasan industry dengan basis sektor produktif unggulan migas dan pertambangan dengan pengembangan manfaat dalam skala nasional dan regional provinsi dengan mengembangkan keterkaitan antara kawasan dan cluster industry.
- 3). Mengembangkan infrastruktur pendukung kawasan eksplorasi, kawasan industry sektor migas dan pertambangan baik pada infrastruktur transportasi, energy dan kelistrikan.
- 4). Meningkatkan pelayanan perkotaan, pemukiman, sektor migas dan pertambangan dan secara timbal balik menjadi pendorong pengembangan pertumbuhan kota sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan.

2. Pengembangan sektor unggulan untuk mengantisipasi habisnya sumber daya migas dan tambang yang bersifat unrenewable melalui pengembangan sektor pertanian yang bersifat renewable.

Sebagai bagian upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dan wilayah serta untuk tujuan mengembangkan provinsi Kalimantan Timur.

Dengan strategi :

- 1). Mengembangkan potensi pada setiap wilayah untuk mengembangkan dan mendorong pengembangan sector dan komoditas unggulan kegiatan sector pertanian,

perkebunan, perikanan dan peternakan untuk dapat lebih berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah.

- 2). Menjadikan bagian dalam upaya mengurangi kesenjangan wilayah dengan mengembangkan wilayah berpotensi agraris pertanian, perkebunan dan perikanan yang pada umumnya adalah wilayah pedalaman, wilayah pedesaan dan wilayah tertinggal.
- 3). Mengembangkan wilayah tertinggal dan/atau pedalaman dalam upaya mengurangi kesenjangan wilayah timur - barat dengan mendorong pusat pertumbuhan baru dengan dukungan basis sektor pertanian.
- 4). Mengembangkan dan meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industry pendukungnya dengan membangun kawasan industry dan infrastruktur terkait.

3. Perwujudan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat.

Provinsi Kalimantan Timur dengan memberikan kesempatan pada seluruh bagian wilayah untuk berkembang sesuai potensinya dengan tidak hanya mengembangkan wilayah yang telah maju dan berkembang namun juga mengembangkan wilayah yang belum maju, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan Negara.

Dengan strategi :

- 1). Meningkatkan pelayanan prasarana wilayah secara lebih merata untuk mendorong dan membangkitkan kegiatan ekonomi pada wilayah belum berkembang.
- 2). Meningkatkan akses dan keterbukaan wilayah dengan pembangunan prasarana pada wilayah pedalaman, kawasan pedesaan untuk kepentingan pelayanan social masyarakat dan membangkitkan kegiatan ekonomi produktif sesuai potensi masing-masing wilayah.
- 3). Mendorong sector ekonomi produktif dan menata pusat pemukiman di kawasan perbatasan untuk memperkuat keterkaitan sosial ekonomi pada pusat kegiatan yang ada di Indonesia agar mencegah kebocoran ekonomi kepada wilayah Negara lain dan menjadi bagian tujuan menjaga kedaulatan NKRI.
- 4). Meningkatkan keterkaitan antar wilayah melalui dukungan infrastruktur transportasi, energy, listrik dan komunikasi agar terjadi hubungan saling sinergi dan saling mendukung antar wilayah.

4. Perwujudan pembangunan provinsi Kalimantan Timur yang berkelanjutan dengan menjaga harmonisasi kegiatan ekonomi, investasi, sosial dengan mempertimbangkan batasan dan daya dukung lingkungan.

Agar tingkat produktivitasnya terjaga melalui upaya kelestarian lingkungan.

Dengan strategi :

- 1). Mengupayakan tindakan aspiratif dan kuratif mengelola kegiatan budidaya yang berpotensi dan telah terindikasi mengganggu kelestarian lingkungan secara konsisten untuk kepentingan keberlanjutan produktivitas kegiatan budidaya itu sendiri.
- 2). Mengupayakan pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan yang karakteristik fisik telah mengalami degradasi lingkungan dan berpotensi menimbulkan dampak bencana.
- 3). Mengupayakan penetapan pola ruang untuk deliniasi kawasan lindung dan budidaya berdasarkan karakteristik kesesuaian dan daya dukung kegiatan yang mempertimbangkan kepentingan kelestarian lingkungan, produktivitas ekonomi, dan kepentingan social budaya masa depan.
- 4). Mengupayakan ketahanan keanekaragaman hayati Kalimantan Timur dan kekayaan tradisi budaya dengan melakukan upaya pelestarian dan konservasi pada kawasan yang memilikinya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi, misi program kepala daerah dan Wakil kepala daerah, Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

A. Pembangunan budaya multikultur dengan mengembangkan aspek-aspek positif dan negatif dan mempertimbangkan harmonisasi keragaman budaya, agama, suku, ras dan tradisi. Harmonisasi keragaman budaya, agama, suku, ras dan tradisi menjadi aspek penting dalam membangun karena adanya aspek kemajemukan didalam masyarakat. Potensi terganggunya keamanan disebabkan oleh kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Potensi konflik horisontal yang banyak terjadi di daerah lain akan meresahkan dan berakibat pudarnya rasa aman di masyarakat. Terjaminnya ketentraman dan ketertiban akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat, merupakan jaminan bagi terlaksananya pembangunan.

B. Peningkatan ketentraman dan ketertiban sehingga dapat mewujudkan suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Terwujudnya suasana lingkungan yang terbebas dari berbagai macam gangguan keamanan dan konflik sosial menjadi modal dasar dalam keberhasilan pembangunan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

Perumusan visi dan misi jangka menengah OPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra OPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Di sini, visi diciptakan melampaui realitas sekarang. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan.

4.1 Visi dan Misi OPD

Visi Kesbangpol merupakan Visi organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan gambaran mengenai kondisi di masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

A. Visi

Suatu visi dibangun sebagai usaha bersama pemerintah dan masyarakat untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan, penilaian atau langkah juga tindakan pada pengabdian yang tulus, dilandasi dengan semangat persatuan yang kokoh dengan

senantiasa mendapat lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan pembangunan demi kehidupan yang makmur, sejahtera dan berwawasan lingkungan. Berbagai isu strategis global, nasional dan isu strategis Provinsi Kalimantan Timur yang lahir dari fakta dan realita permasalahan yang menjadi prioritas untuk ditangani sesegera mungkin serta komitmen Badan Kesbangpol Kalimantan Timur, maka dirumuskan visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya masyarakat yang damai, tentram dan demokratis, serta berwawasan kebangsaan di Wilayah Kalimantan Timur

Adapun makna dari visi tersebut sebagai berikut :

- **Masyarakat yang damai**, yaitu wujud yang diharapkan dari pembinaan kesatuan bangsa yang dilakukan dalam kerangka kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- **Tentram**, yaitu tentram adalah rasa dimana kita merasa dapat melakukan segala hal tanpa ada gangguan sama sekali atau rasa dimana kita akan merasa tenang jika apa yang kita miliki tidak diusik oleh orang yang tidak kita kehendaki atau perasaan yang nyaman dimana kita tidak mempunyai prasangka yang buruk kepada seseorang. Perasaan aman atau tidak aman mungkin

baru kita rasakan ketika aktivitas kita terganggu oleh sesuatu yang ekstrim.

- **Demokratis**, yaitu Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.
- **Berwawasan Kebangsaan**, yaitu mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa, di wilayah Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 5 (lima) buah misi sesuai dengan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan system demokrasi yang kondusif di wilayah Kalimantan Timur.
2. Mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang berwawasan kebangsaan,.
3. Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan di kalimantan Timur
4. Mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.

Tujuan dan sasaran merupakan kristalisasi dari visi dan misi Renstra OPD agar apa yang akan diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang lebih spesifik dan terukur. Kejelasan indikator pada sasaran meningkatkan kualitas perencanaan sehingga sumber daya organisasi selama lima tahun mendatang lebih fokus dalam agenda kerjanya. Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Badan Kesbangpol yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu strategis. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Kesbangpol dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaran adalah tolak ukur keberhasilan

pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

Berdasarkan visi dan misi beserta penjelasannya, diatas maka tujuan dan sasaran pembangunan Badan Kesbangpol selama 5 (lima) tahun kedepan diuraikan sebagaiberikut:

1) Mewujudkan system demokrasi yang kondusif di Wilayah Kalimantan Timur.

Tujuan : Menciptakan situasi politik yang sehat bagi masyarakat dalam proses pembangunan dan meningkatkan interaksi infra struktur dan supra struktur politik.

Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Indikator Sasaran :

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.
- Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur.

2) Mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang berwawasan kebangsaan.

Tujuan : Menciptakan masyarakat Kalimantan Timur yang berwawasan kebangsaan dalam rangka kondusifitas daerah

Sasaran : Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat Kalimantan Timur.

IndikatorSasaran : Peningkatan Wawasan Kebangsaan

3) Mewujudkan ketahanan social dan ekonomi masyarakat dalam rangka menopang stabilitas nasional.

Tujuan : 1. Meningkatkan stabilitas social ekonomi yang dinamis bagi kelancaran pembangunan.

2. Terbangunnya suatu kelembagaan social ekonomi dimasyarakat yang kokoh.

Sasaran : 1. Terjalannya hubungan kerjasama yang dinamis dalam struktur social ekonomi masyarakat.

2. Tersedianya data dan informasi sebagai bahan kajian mengenai perkembangan situasi social ekonomi di daerah.

IndikatorSasaran : 1. Peningkatan kerjasama antar lembaga/ instansi terkait (Dinsos, Kepolisian,

Dikbud, BNN, Perindagkop, Dinas Pasar).

2. Tersedianya data perkembangan ekonomi dan terpantaunya kerawanan sosial.

4) Mewujudkan kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan.

Tujuan : Terwujudnya kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan.

Sasaran : Terciptanya kerjasama penanganan konflik secara komprehensif.

IndikatorSasaran : Penurunan jumlah konflik

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Rentra 2013-2018

Pelayanan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

NO	Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -						
	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	2014	2015	2016	2017		2018	
										Semula	Menjadi	Semula	Menjadi
1	Menciptakan situasi politik yang sehat bagi masyarakat dalam proses pembangunan dan meningkatkan iteraksi infra struktur dan supra struktur politik	Menciptakan situasi politik yang sehat bagi masyarakat dalam proses pembangunan dan meningkatkan iteraksi infra struktur dan supra struktur politik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan IDI Kaltim	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu	6%	67%	68%	70%	70%	71,25%	71,25%
					Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia di Kaimantan Timur	Indek Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur	66,37	70	72	73%	73%	75%	75%
2	Menciptakan masyarakat Kalimantan Timur yang berwawasan kebangsaan dalam rangka kondusifitas daerah	Menciptakan masyarakat Kaltim yang berwawasan dan berkarakter Kebangsaan	Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat Kalimantan Timur	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat Kalimantan Timur	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat	Masyarakat Kalimantan Timur yang memahami wawasan dan karakter bangsa	10	15	20	25	400 org	30	2.500 org
3	Terbangunya suatu kelembagaan sosial ekonomi dimasyarakat yang kokoh	Terwujudnya ketahanan ekonomi,sosial budaya,agama,dan ormas Kaltim	Terjalannya hubungan kerjasama yang dinamis dalam struktur sosial ekonomi masyarakat	Meningkatnya ketahanan ekonomi,sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan	Peningkatan kerjasama antar lembaga/instansi terkait (Dinsos,Kepolisian ,Disbud,BNN,Peri ndagkop,Dinas Pasar,BLH)	Meningkatnya Stabilitas Ekonomi dan Sosial Budaya	100	100	100%	104	4 dok	100	4 dok

					Tersedianya data dan informasi sebahabahan kajian mengenai perkembangan situasi sosial ekonomi di daerah	Peningkatan pemberdayaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan	10 Kab /Kota	10 Kab /Kota	100%	10 Kab /Kota	75%	10 Kab /Kota	80%
4	Terwujudnya kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan	Meningkatkan kewaspadaan dan kondusifitas daerah	Terciptanya kerjasama penanganan konflik secara konferhensif	Terwujudnya kewaspadaan dan kondusifitas di Kaltim	Penurunan jumlah konflik	Penurunan jumlah konflik	169	144	122	104	104	88	88

4.3 Strategi dan Kebijakan OPD.

A. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam perencanaan tahun 2013- 2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggunakan strategi:

- 1) Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat
- 2) Pemberian pemahaman tentang wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
- 3) Mengedepankan fasilitasi dari pada regulasi atas kegiatan sosial ekonomi masyarakat di daerah.
- 4) Mengedepankan fasilitasi dan regulasi pemberantasan penyakit masyarakat.
- 5) Membangun komunikasi, koordinasi, dan konsultasi pusat, daerah dan kabupaten/kota serta lembaga terkait.
- 6) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik urusan kesbangpol secara maksimal.

B. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam perencanaan strategistahun 2013 - 2018 tersebut perlu ditetapkan suatu kebijakan sebagai berikut.

- 1) Membina dan meningkatkan pemahaman politik masyarakat.

- 2) Membina dan meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat.
- 3) Membina dan meningkatkan pemahaman ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 4) Memantapkan sinergitas pemahaman tentang penanganan penyakit masyarakat di daerah.
- 5) Memfasilitasi setiap gejolak dan masalah sosial dan konflik di masyarakat bersama dengan lembaga/ instansi terkait di daerah.
- 6) Keterbukaan informasi kepada masyarakat melalui sistem informasi dan penyederhanaan *Standart Operational Procedure* (SOP) Pelayanan Bakesbangpol.

Rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur disajikan dalam tabel 4.1. dibawah ini :

VISI : "Terwujudnya masyarakat yang damai, tentram dan demokratis, serta berwawasan kebangsaan di Wilayah Kalimantan Timur".

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	STRATEGI	KEBIJAKAN UMUM
MISI 1 : Mewujudkan sistem demokrasi yang kondusif di Wilayah Kalimantan Timur					
Menciptakan situasi politik yang sehat bagi masyarakat dalam proses pembangunan dan meningkatkan interaksi infra struktur dan supra struktur politik	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan IDI Kaltim	Jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu Indek Demokrasi Indonesia di Kaltim	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat	Membina dan meningkatkan pemahaman politik masyarakat
MISI 2 : Mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang berwawasan kebangsaan					
Menciptakan masyarakat Kaltim yang berwawasan dan berkarakter Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat Kalimantan Timur	Masyarakat yang memahami wawasan dan karakter kebangsaan	Program Pengembangan wasan kebangsaan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan yang berkarakter kepada masyarakat Kaltim	Membina dan meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan yang berkarakter kepada masyarakat Kaltim
MISI 3 : Meningkatkan Ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan					
Terwujudnya Ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, dan ormas Kaltim	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan	Menurunnya konflik sosial yang terjadi di masyarakat Prosentase pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan	Program : Peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) Program : Prosentase pembinaan terhadap Ormas	Mengedepankan fasilitasi daripada regulasi atas kegiatan ekonom, sosial budayadan ormas masyarakat di daerah	Membina serta meningkatkan pemahaman ketahanan ekonomi, sosial budaya dan ormas
MISI 4 : Terwujudnya Kewaspadaan dan kondusifitas di Kaltim dengan mensinergikan peran masyarakat dan pemerintah dalam membangun Provinsi Kaltim					
Meningkatkan kewaspadaan dan kondusifitas serta mensinergikan peran masyarakat dan pemerintah dalam membangun Provinsi Kaltim	Terwujudnya Kewaspadaan dan kondusifitas di Kaltim dengan mensinergikan peran masyarakat dan pemerintah dalam membangun Provinsi Kaltim	Masyarakat kaltim hidup aman, tertib dan damai dapat menurunkan angka konflik	Program : Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Membangun Komunikasi, koordinasi dan konsultasi dalam rangka penanganan konflik sosial	Memfasilitasi setiap gejala dan masalah sosial dan konflik di masyarakat bersama dengan lembaga/instansi terkait di daerah

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

1. Program Pendidikan Politik masyarakat, dengan kegiatan-kegiatannya :
 - Pemantauan perkembangan politik;
 - Sosialisasi bimtek verifikasi berkas bantuan parpol
 - Sosialisasi pendidikan politik bagi perempuan;
 - Sosialisasi IDI bagi aparaturnya dan rapat Tim IDI;
 - Pemantauan perkembangan politik;
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan-kegiatannya :
 - Sosialisasi peningkatan bela negara
 - Sosialisasi dan Fasilitasi pendidikan wasbang
 - Fasilitasi pembentukan PPWK dan FPK
 - Sosialisasi Revitalisasi nilai-nilai Pancasila
3. Program peningkatan pemberantasan Penyakit masyarakat, dengan kegiatan-kegiatannya :
 - Pemantauan dampak kelangkaan/Kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.
 - Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan gelap narkoba;
 - Fasilitasi FKUB
 - Pendataan dan pemilahan data unras, Ekonomi, Sosial, Budaya dan agama
 - Melakukan tes Urin bagi PNS dan tenaga honorer.
4. Program penguatan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan :
 - Kegiatan pemberdayaan/ Organisasi kemasyarakatan

5. Program Keamanan dan kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan-kegiatannya :

- Pertemuan rutin FKDM dan Tim Terpadu
- Monitoring dan evaluasi penanganan konflik sosial.
- Pembinaan dan pengawasan dalam rangka cegah dini.

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan-kegiatannya:

- Penyediaan jasa surat-menyurat.
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
- Penyediaan alat tulis kantor.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- Penyediaan makanan dan minuman.
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah.
- Pengamanan asset dan rumah jabatan.

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan-kegiatannya :

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
- Pengadaan peralatan gedung kantor.
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

- Pemeliharaan rutin/berkala meubelair.
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan-kegiatannya:
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.
 - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu.
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan-kegiatannya :
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
 - Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang - undangan.
 - Rapat Koordinasi Kesbangpol.
8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan-kegiatannya :
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan-kegiatannya :
- Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

Adapun untuk lebih jelasnya sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

VISI : Terwujudnya masyarakat yang solid, profesional, demokratis, berwawasan kebangsaan dalam bingkai NKRI																				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2014		2015		2016		2017		2018		TARGET	Rp (juta)		
							TARGET	Rp (juta)	TARGET	Rp (juta)	TARGET	Rp (juta)	TARGET	Rp (juta)	TARGET	Rp (juta)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
MISI 1 : Mewujudkan sistem demokrasi yang kondusif																				
Menciptakan situasi politik yang sehat bagi masyarakat dalam proses pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi.	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur		67	750.000	70	800.000	72	850.000	73	900.000	75%	950.000	75%	4.250.000	Bidang Politik Dalam Negeri		
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada.		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada.	55,81 %	65	6.000.000	67	1.000.000	68	1.000.000	70	1.000.000	71,24 %	3.000.000	71,24 %	12.000.000	Bidang Politik Dalam Negeri		
			1. Penyuluhan / sosialisasi UU / Peraturan kepada masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan politik.		200 orang(Mahasiswa 100, Ormas 40, Toga 20, Pemuda 10, Etnis 10, LSM 10, Tomas 10)	900.000	200 orang(Mahasiswa 100, Ormas 40, Toga 20, Pemuda 10, Etnis 10, LSM 10, Tomas 10)	1.035.000	200 orang(Mahasiswa 100, Ormas 40, Toga 20, Pemuda 10, Etnis 10, LSM 10, Tomas 10)	1.190.250	200 orang(Mahasiswa 100, Ormas 40, Toga 20, Pemuda 10, Etnis 10, LSM 10, Tomas 10)	1.368.788	200 orang(Mahasiswa 100, Ormas 40, Toga 20, Pemuda 10, Etnis 10, LSM 10, Tomas 10)	1.574.106	1000 orang	6.068.144	Bidang Politik Dalam Negeri		
			2. Penyusunan data base parpol, orpol, omas, ism, dan lembaga adat	Terselesaikannya verifikasi dan pengumpulan data parpol, omas, LSM dan lembaga adat.		1 Dokumen	1.250.000	1 Dokumen	1.437.500	1 Dokumen	1.653.125	1 Dokumen	1.901.094	1 Dokumen	2.186.258	5 Dokumen	8.427.977	Bidang Politik Dalam Negeri		
				Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Data Base.		60 orang(Kesbang Kab/Kota 40, Prov. 20)		60 orang(Kesbang Kab/Kota 40, Prov. 20)		60 orang(Kesbang Kab/Kota 40, Prov. 20)		60 orang(Kesbang Kab/Kota 40, Prov. 20)		60 orang(Kesbang Kab/Kota 40, Prov. 20)		300 orang				

				Terlaksananya pemilu secara aman dan lancar	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		5 Dokumen				
			3.	Facilitasi penyelenggaraan Pemilu / Pilleg / Pilpres / Pilkada	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi.	500 orang (Ormas 100, LSM 100, OKP 50, Paguyuban 50, Muspida 100, KPU 40, Toga 30, tomas 30)	6.000.000	100 orang (Ormas dan LSM)	6.900.000	100 orang (Ormas dan LSM)	7.935.000	100 orang (Ormas dan LSM)	9.125.250	300 orang (Ormas dan LSM, Tomas, Toga, Todat dan Parpol)	10.494.038	1100 orang	40.454.288		Bidang Politik Dalam Negeri
			4.	Facilitasi / Penelitian berkas bantuan partai politik	Dokumen bantuan kepada parpol	4 Dokumen	500	4 Dokumen	575	4 Dokumen	662	4 Dokumen	762	4 Dokumen	877	20 Dokumen	3.376		Bidang Politik Dalam Negeri
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan	100 orang (Pengurus Parpol)		100 orang (Pengurus Parpol)		100 orang (Pengurus Parpol)		100 orang (Pengurus Parpol)		100 orang (Pengurus Parpol)		500 orang			
			5.	Penyusunan indeks demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur.	Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur	4 Dokumen	750.000	4 Dokumen	863.000	4 Dokumen	993.000	4 Dokumen	1.142.000	4 Dokumen	1.314.000	20 Dokumen	5.062.000		Bidang Politik Dalam Negeri
					Jumlah peserta yang memahami Indeks Demokrasi Indonesia	100 orang (Aparatur Prov dan Kab/kota)		100 orang (Aparatur Prov dan Kab/kota)		100 orang (Aparatur Prov dan Kab/kota)		100 orang (Aparatur Prov dan Kab/kota)		100 orang (Aparatur Prov dan Kab/kota)		500 orang			
			6.	Verifikasi berkas bantuan ormas, lsm, OKP dan organisasi lainnya.	Rekomendasi berkas bantuan kepada ormas, LSM, OKP dan organisasi lainnya.	12 Dokumen	1.000.000	12 Dokumen	1.150.000	12 Dokumen	1.322.500	12 Dokumen	1.520.875	12 Dokumen	1.749.007	60 Dokumen	6.742.382		Bidang Politik Dalam Negeri
			7.	Kerjasama dengan ormas/LSM bidang Kesbangpol Dalam Negeri.	Meningkatnya kerjasama dan pemahaman Ormas/LSM mengenai demokrasi	100 orang	500.000	100 orang	575.000	100 orang	662.000	100 orang	762.000	100 orang	877.000	500 orang	3.376.000		Bidang Politik Dalam Negeri
MISI 2 : Mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang berwawasan kebangsaan.																			
Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat Kalimantan Timur.	Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat Kalimantan Timur.	Meningkatnya wawasan kebangsaan bagi masyarakat kalim	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan di masyarakat.															Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan.

			Sosialisasi Revolusi Mental	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi								100 orang Aparatur	800.000	100 orang	800.000 orang			
			Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air di daerah perbatasan.	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan wasbang di perbatasan	100 orang pelajar SLTA	450.000	100 dari OKP	517.500	100 orang pramuka	595.125	100 orang pelajar SLTA	684.394	100 orang dari OKP	787.053	500 orang	3.034.072	Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan.	
			Peningkatan kesadaran Bela Negara.	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kesadaran bela negara	100 orang dari OKP	350.000	100 Pelajar SLTA	402.500	100 orang Pramuka	462.875	100 orang Pemuda lintas agama	532.306	100 orang pelajar SLTA	612.152	500 Orang	2.359.833	Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan.	
			Revitalisasi nilai-nilai Pancasila.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi revitalisasi	100 orang pelajar SLTA	284.000								100 orang Pelajar SLTA		Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan.		
				Jumlah peserta yang mengikuti Kemah bakti			250 orang Pelajar, OKP, IRMA, PPG, Pramuka	750.000	250 orang Pelajar, OKP, IRMA, PPG, Pramuka	862.500	250 orang Pelajar, OKP, IRMA, PPG, Pramuka	991.875	250 Orang Pelajar, OKP, IRMA, PPG, Pramuka	1.140.657	1000 orang Pelajar, OKP, IRMA, PPG, Pramuka	3.745.032	Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan.	
			Facilitasi dan sosialisasi pembentukan Forum Pembaruan Kebangsaan se Kalimantan Timur.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	100 orang (Aparatur Kesbang se Kaltim dan FKP yang telah terbentuk)	959.000		1.102.850		1.268.280		1.458.518		100 orang	1.677.300	Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan.	Samarinda, Bali, Yogya, Bandung, Medan	
				Jumlah peserta yang mengikuti Rakor FPK se kaltim	-		100 orang		100 orang		100 orang		100 Orang		400 orang			
			Sosialisasi PPWK	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi wasbang									2500 orang	800.000	2500 orang			
			Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa.	100 orang (toga 25, tomas 25, todot 10, pemuda 40)	450.000	100 orang (toga 25, tomas 25, todot 10, pemuda 40)	517.500	100 orang (toga 25, tomas 25, todot 10, pemuda 40)	595.125	100 orang (toga 25, tomas 25, todot 10, pemuda 40)	684.394	100 orang (toga 25, tomas 25, todot 10, pemuda 40)	787.053	500 orang		Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan.	Berau, Kubar, Kutim, PPU, Bontang
			Proram Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terjalannya kemitraan terhadap para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.												Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan.		

			Pembaunan bagi generasi muda, pelajar dan pramuka	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembaunan bagi generasi muda, pelajar dan pramuka.	100 orang (Pelajar SLTA)	514.000	100 orang (OKP dan lintas agama)	591.100	100 orang (Pramuka)	679.765	100 orang (Pelajar SLTA)	781.730	100 orang (generasi muda)	898.990	500 orang		Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan.	Kutim, Paser, Balikpapan, Kukar, Bontang, Samarinda
			Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan.	Dokumen pelaksanaan Fasilitas keagamaan	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		20 Dokumen		Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan.	
			Pentas seni, budaya dan lomba dalam rangka peningkatan wasbang.	Jumlah peserta lomba Pentas Seni wasbang.	100 orang pelajar (SLTA 50, SLTP 50)	350.000	-	-	-	-	100 orang pelajar (SLTA 50, SLTP 50)	532.306	-	-	200 Org	882.306	Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan.	
				Jumlah peserta Cermar Cermad	-	-	100 orang pelajar SLTP	402.500	-	-	-	-	100 orang pelajar (SD 50, SLTP 50)	612.152	200 Orang	1.014.652		
				Jumlah Peserta Lomba Cipta	-	-	-	-	100 Orang (SD 30, SLTP 35, SLTA 35)	482.875	-	-	-	-	100 Orang	482.875		
			Pembinaan pemantapan wawasan kebangsaan bagi dosen dan gurulustadz.	Jumlah Peserta	100 Orang (Dosen 10, Guru SLTP 30 SLTA 30, Ustadz 30)	350.000	100 Orang (Guru SLTP 35 SLTA 35, Ustadz 30)	402.500	100 Orang (Guru SLTP 35 SLTA 35, Ustadz 20, Guru SD 10)	462.875	100 Orang (Guru SLTP 35 SLTA 35, Ustadz 20, Guru SD 10)	532.306	100 Orang (Guru SLTP 35 SLTA 35, Ustadz 20, Guru SD 10)	612.152	100 Orang	2.359.833	Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan.	
			Kegiatan pemantauan pengawasan orang asing, NGO dan lembaga asing.	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	350.000	4 Dokumen	402.500	4 Dokumen	462.875	4 Dokumen	532.306	4 Dokumen	612.152	20 Dokumen	2.359.833	Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan.	
Misi 3 : Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka Menopang Stabilitas Nasional.																		
1	Meningkatkan stabilitas sosial ekonomi yang dinamis bagi kelancaran pembangunan.	1	Terfasilitasinya keberadaan infrastruktur sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat.	Terdapatnya jumlah lembaga dan kajian ekonomi (UKM, Koperasi, Perbankan).	Program Ketahanan Sosial dan Ekonomi												Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi.	

2	Terbangunnya suatu kelembagaan sosial ekonomi dimasyarakat yang kokoh.	2	Terjalinya hubungan kerjasama yang dinamis dalam struktur sosial ekonomi masyarakat.	Peningkatan Kerjasama antar lembaga/institusi terkait (Dinsos, Kepolisian, Dikbud, BNN, Perindagkop)																	
3	Tersedianya data dan informasi sebagai bahan kajian mengenai perkembangan situasi sosial ekonomi di daerah dan terdapatnya dampak dari kejadian itu																				
			Pemantauan dampak kelangkaan / kenaikan harga.	Jumlah dokumen yang dihasilkan	5 Dokumen di luar 9 Bahan Pokok	600.001	5 Dokumen di luar 9 Bahan Pokok	690.001	5 Dokumen di luar 9 Bahan Pokok	793.501	5 Dokumen di luar 9 Bahan Pokok	912.526	5 Dokumen bahan pokok	1.049.405	21 Dokumen di luar 9 Bahan Pokok	4.045.430					Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi.
			Pemantauan dampak kebijakan perekonomian.	Jumlah dokumen yang dihasilkan	4 Dokumen bahan pokok	450.000	4 Dokumen bahan pokok	517.500	4 Dokumen bahan pokok	595.125	4 Dokumen bahan pokok	684.394	4 Dokumen bahan pokok	787.398	20 Dokumen Bahan Pokok	4.045.429					Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi.
			Sosialisasi dampak peredaran uang palsu.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	200 org (Pelajar 120, LSM 20, Ormas 20, Masyarakat 40)	500.000	200 org (Pelajar 120, LSM 20, Ormas 20, Masyarakat 40)	575.000	200 org (Pelajar 120, LSM 20, Ormas 20, Masyarakat 40)	661.250	200 org (Pelajar 120, LSM 20, Ormas 20, Masyarakat 40)	760.483	200 org (Pelajar 120, LSM 20, Ormas 20, Masyarakat 40)	874.504	1000 orang	3.371.192					Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi.
			Peningkatan masyarakat akan cinta produksi dalam negeri dan perlindungan konsumen	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	100 orang (UKM 60, Ormas 20, LSM 20)	500.000	100 orang (UKM 60, Ormas 20, LSM 20)	575.000	100 orang (UKM 60, Ormas 20, LSM 20)	661.250	100 orang (UKM 60, Ormas 20, LSM 20)	760.483	100 orang (UKM 60, Ormas 20, LSM 20)	874.504	500 Orang	3.371.192					Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi.
			Pembauran antar pelajar dalam pemberantasan batapan liar.	Jumlah peserta kegiatan	100 orang (pelajar SLTA 50, SLTP 50)	350.000	100 orang (pelajar SLTA 50, SLTP 50)	402.500	100 orang (pelajar SLTA 50, SLTP 50)	462.875	100 orang (pelajar SLTA 50, SLTP 50)	532.306	100 orang (pelajar SLTA 50, SLTP 50)	612.152	500 Orang	2.459.833					Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi.
			Fasilitasi enegahan dan pemberantasan penyalahgunaan gelap narkoba.	Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Orang (Pelajar 40, Mahasiswa 30, Ormas 15, LSM 15)	350.000	100 Orang (Pelajar 40, Mahasiswa 30, Ormas 15, LSM 15)	402.500	100 Orang (Pelajar 40, Mahasiswa 30, Ormas 15, LSM 15)	462.875	100 Orang (Pelajar 40, Mahasiswa 30, Ormas 15, LSM 15)	532.306	100 Orang (Pelajar 40, Mahasiswa 30, Ormas 15, LSM 15)	612.152	500 Orang (Pelajar 40, Mahasiswa 30, Ormas 15, LSM 15)	2.459.833					Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi.

			Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kerukunan umat beragama		100 orang (Islam 30 Kristen Katholik 15, protestan 10, hindu 15, Budha 15, tokoh agama 15)	500.000	100 orang (Islam 30 Kristen Katholik 15, protestan 10, hindu 15, Budha 15, tokoh agama 15)	575.000	100 orang (Islam 30 Kristen Katholik 15, protestan 10, hindu 15, Budha 15, tokoh agama 15)	661.250	100 orang (Islam 30 Kristen Katholik 15, protestan 10, hindu 15, Budha 15, tokoh agama 15)	760.438	100 orang (Islam 30 Kristen Katholik 15, protestan 10, hindu 15, Budha 15, tokoh agama 15)	874.504	500 orang	3.371.192	Bidang Bina Ideologi dan Kewaspadaan.	
			Fasilitasi pelaksanaan pengamanan sosial kemasyarakatan anak terlantar / jalanan.	Jumlah peserta Sosialisasi		100 Orang Anjal	550.000	100 Orang Anjal	632.500	100 Orang Anjal	727.375	100 Orang Anjal	836.481	100 Orang Anjal	961.953	500 Orang Anjal	3.708.309	Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi.	
Misi 4 : Mewujudkan Kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan.																			
Meningkatnya kondusifitas di daerah dengan bersinerginya peran-peran masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan.	Terciptanya kerjasama penanganan konflik secara komprehensif.	Menurunnya jumlah konflik.	Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Terwujudnya keamanan, ketertiban dan stabilitas daerah.														Bidang Penanganan Bencana dan Konflik.	
			Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).	Jumlah dokumen yang dihasilkan.		12 Dokumen		12 Dokumen	3.450.000	12 Dokumen	3.967.500	12 Dokumen	4.562.625	12 Dokumen	5.247.019			Bidang Penanganan Bencana dan Konflik.	
				Jumlah peserta yang mengikuti Rakor Kominda		100 orang	3.000.000	80 orang		80 orang		80 orang		80 orang					
			Deteksi Dini / Kewaspadaan Dini.	Jumlah dokumen yang dihasilkan.		4 dokumen	1.400.000		1.610.000		1.851.500		2.129.225		2.448.609			Bidang Penanganan Bencana dan Konflik.	
				Jumlah peserta yang mengikuti rakor FKDM		100 orang		80 orang		80 orang		80 orang		80 orang		420 orang			
			Sosialisasi / Desiminasi / publikasi peraturan perundangan penanganan konflik dan peraturan pelaksanaannya.	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/desiminasi/publikasi per uu.		200 orang (Aparatur kesbang kab/kota 40, Todat 20, Toga 20, Pemuda 80)	550.000	100 orang (Aparatur kesbang kab/kota 20, Tomas 20, Todat 10, Toga 10, Pemuda 40)	300.000	100 orang (Aparatur kesbang kab/kota 20, Tomas 20, Todat 10, Toga 10, Pemuda 40)	345.000	100 orang (Aparatur kesbang kab/kota 20, Tomas 20, Todat 10, Toga 10, Pemuda 40)	396.750	100 orang (Aparatur kesbang kab/kota 20, Tomas 20, Todat 10, Toga 10, Pemuda 40)	456.262	600 orang	2048012	Bidang Penanganan Bencana dan Konflik.	Balikpapan, PPU, Paser, Kutim, Kukar, Berau

			Monitoring, analisa, sinkronisasi laporan penanganan konflik.	Laporan Kejadian / Penanganan Konflik		4 Dokumen	500	4 Dokumen	575	4 Dokumen	661	4 Dokumen	760	4 Dokumen	874	20 Dokumen	3870	Bidang Penanganan Bencana dan Konflik.	10 Kabupaten/Kota
			Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba.	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan penggunaan minuman keras dan narkoba		100 orang (Pelajar 60, Pemuda 20 Pramuka 20)	400	100 orang (Pelajar 60, Pemuda 20 Pramuka 20)	460	100 orang (Pelajar 60, Pemuda 20 Pramuka 20)	529	100 orang (Pelajar 60, Pemuda 20 Pramuka 20)	608	100 orang (Pelajar 60, Pemuda 20 Pramuka 20)	699	500 orang	2696	Bidang Penanganan Bencana dan Konflik.	Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutim, Paser)
			Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur.	Jumlah peserta yang mengikuti Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur.		100 orang (Pelajar dan Pramuka)	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Penanganan Bencana dan Konflik.	Samarinda.
			Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan.	Jumlah peserta yang mengikuti Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan.		100 orang (Tomas 25, Toga 25, Todat 25 dan Aparatur 25)	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Penanganan Bencana dan Konflik.	Berau
			Dialog masalah konflik sosial di masyarakat.	Berkurangnya konflik sosial di masyarakat.		186	167	150	135	121	108	108	108	108	108	108	108	Bidang Penanganan Bencana dan Konflik.	
				Jumlah peserta yang mengikuti dialog masalah konflik sosial		100 orang (Tomas 20, Toga 20, Todat 20 dan Aparatur 20 dan FKDM Kab/Kota 20)	450	100 orang (Tomas 20, Toga 20, Todat 20 dan Aparatur 20 dan FKDM Kab/Kota 20)	517	100 orang (Tomas 20, Toga 20, Todat 20 dan Aparatur 20 dan FKDM Kab/Kota 20)	594	100 orang (Tomas 20, Toga 20, Todat 20 dan Aparatur 20 dan FKDM Kab/Kota 20)	683	100 orang (Tomas 20, Toga 20, Todat 20 dan Aparatur 20 dan FKDM Kab/Kota 20)	785	500 orang	3029		
			Tim verifikasi penertiban rekomendasi penelitian.	Dokumen Verifikasi Penerbitan Rekomendasi Penelitian		12 Dokumen	500	12 Dokumen	575	12 Dokumen	661	12 Dokumen	760	12 Dokumen	874	60 Dokumen	3370	Bidang Penanganan Bencana dan Konflik.	
			Pengembangan kapasitas kemampuan intelijen aparat Kesbangpol dan Kominda se Kaltim.	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Keintelijenan		50 orang (Intelijen Kesbangpol dan Kominda)	600	50 orang (Intelijen Kesbangpol dan Kominda)	690	50 orang (Intelijen Kesbangpol dan Kominda)	793	50 orang (Intelijen Kesbangpol dan Kominda)	911	50 orang (Intelijen Kesbangpol dan Kominda)	1.047	600 orang	4041	Bidang Penanganan Bencana dan Konflik.	
			Sosialisasi Pendidikan Anti Kekerasan	Jumlah peserta sosialisasi		100 orang Aparatur	1.392.000	100 orang Aparatur	1.600.800	100 orang Aparatur	1.840.920	100 orang Aparatur	2.117.058	100 orang Aparatur	2.434.616	500 orang aparat	9385394		
			Jumlah Peserta Rakor Tim Terpadu		100 orang Aparatur	100 orang Aparatur		100 orang Aparatur		100 orang Aparatur		100 orang Aparatur		100 orang Aparatur		100 orang Aparatur		100 orang Aparatur	500 orang aparat
			Jumlah peserta Sosialisasi Tim Terpadu		100 orang Aparatur	100 orang Aparatur		100 orang Aparatur		100 orang Aparatur		100 orang Aparatur		100 orang Aparatur		100 orang Aparatur		100 orang Aparatur	500 orang aparat

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

RPJMD PROVINSI			RENSTRA SKPD							
Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Tujuan	Sasaran	IKU		Strategi	Kebijakan	Program Prioritas Renstra	
					Indikator	Target				
						2014				2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Menciptakan situasi politik yang sehat bagi masyarakat dalam proses pembangunan dan meningkatkan interaksi infra struktur dan supra struktur politik.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan meningkatnya kualitas demokrasi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada.	65	71,24 %	Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat.	Membina dan meningkatkan pemahaman politik bagi masyarakat.	Program Pendidikan Politik Masyarakat.
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Menciptakan masyarakat Kalimantan Timur yang berwawasan kebangsaan dalam rangka kondusifitas daerah.	Meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat Kalimantan Timur	Penurunan Jumlah Konflik	169	88	Pemberian pemahaman tentang wawasan kebangsaan	Membina dan meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Terwujudnya kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerinah dalam pembangunan	Terciptanya kerjasama penanganan konflik secara konfrehensif				Mengedepankan fasilitasi dan regulasi pemberantasan penyakit masyarakat	Memfasilitasi setiap gejala masalah sosial dan konflik di masyarakat bersama dengan lembaga/instansi terkait di daerah	Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

BAB VII

KAJIDAH PELAKSANAAN

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama periode 2013-2018, mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018.

Renstra SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat *vital* dan *urgent* dalam peningkatan di bidang kesatuan bangsa dan politik selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur selama periode lima tahun, pada tahun 2013 s.d. 2018 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

YUDHA PRANOTO

Pembina Utama Muda

NIP 19640817 201006 1 001

